

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Dinas Ketenagakerjaan adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kota Balikpapan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Ketenagakerjaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Balikpapan, April 2019

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**



TIRTA DEWI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1-2
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4-6
III. Laporan Operasional	7-8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10-39
A. Penjelasan Umum	10-19
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20-27
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	28-33
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	34-35
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36-37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI. Lampiran dan Daftar	39

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balikpapan, April 2019

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'D' followed by the name 'Tirta Dewi' in a cursive script.

TIRTA DEWI

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 133.116.000,00 atau mencapai 65,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 202.800.000.

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 6.802.418.050,00 atau mencapai 93,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.273.158.800,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 8.600.139.910,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.280.500,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 6.954.415.660,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 1.644.443.750,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 265.149.711,60 dan Rp. 8.334.990.198,40

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 133.116.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 6.739.988.099,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (6.488.232.394,89)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 8.226.792.468,29 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (6.488.232.394,89) ditambah dengan koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. (65.774.425,00) dan Koreksi Ekuitas lainnya senilai total Rp. (7.107.500,00), sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 8.334.990.198,40 Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS KETENAGAKERJAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1	202,800,000	133,116,000	65.64	273,923,800
Pendapatan Pajak Daerah					
Pendapatan Retribusi Daerah		202,800,000	133,116,000	65.64	273,923,800
Lain-lain PAD yang Sah					
Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
JUMLAH PENDAPATAN		202,800,000	133,116,000	65.64	273,923,800
BELANJA	B.2.	7,273,158,800	6,802,418,050		5,288,672,897
Belanja Operasi		6,801,153,800	6,339,512,550		5,288,672,897
Belanja Pegawai	B.3	4,946,723,000	4,665,952,342	94.32	2,997,261,861
Belanja Barang dan Jasa	B.4	1,854,430,800	1,673,560,208	90.25	2,291,411,036
Jumlah Belanja Operasi		6,801,153,800	6,339,512,550		5,288,672,897
Belanja Modal	B.5	472,005,000	462,905,500		-
Belanja Tanah					
Belanja Peralatan dan Mesin		424,005,000	415,132,500	97.91	-
Belanja Gedung dan Bangunan					
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Belanja Aset Tetap Lainnya					
Belanja Aset Lainnya		48,000,000	47,773,000	99.53	
Jumlah Belanja Modal		472,005,000	462,905,500		
JUMLAH BELANJA		7,273,158,800	6,802,418,050	93.53	5,288,672,897

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

DINAS KETENAGAKERJAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET		8,600,139,910.00	8,612,308,241.0000
ASET LANCAR		1,280,500.00	7,121,100
Persediaan	C.1	1,280,500	7,121,100
Persediaan Bahan Pakai Habis	C.2	1,280,500	7,121,100
Persediaan Alat Tulis Kantor	C.3	1,280,500	2,447,500
Persediaan Blanko/Cetakan	C.4	-	4,673,600
ASET TETAP		6,954,415,660.00	6,921,228,716.0000
Tanah	C.16	6,170,250,000.00	6,170,250,000.00
Tanah Untuk Bangunan Gedung		6,170,250,000.00	6,170,250,000.00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		1,625,250,000.00	1,625,250,000.00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		4,545,000,000.00	4,545,000,000.00
Peralatan dan Mesin	C.17	3,774,282,065.67	3,366,257,065.67
Alat-alat Bantu		71,500,000.00	71,500,000.00
Electric Generating Set		71,500,000.00	71,500,000.00
Alat Angkutan Darat Bermotor		1,652,149,119.67	1,652,149,119.67
Kendaraan Bermotor Penumpang		1,297,462,621.67	1,297,462,621.67
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		135,800,000.00	135,800,000.00
Kendaraan Bermotor Khusus		-	-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua		218,886,498.00	218,886,498.00
Alat Kantor		162,522,500.00	148,522,500.00
Mesin Tik		10,930,000.00	10,930,000.00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		22,362,500.00	22,362,500.00
Alat Kantor Lainnya		53,830,000.00	53,830,000.00
Penghancur Kertas		14,000,000.00	-
Mesin Antrian		35,000,000.00	35,000,000.00
Papan Visual Elektronik		23,900,000.00	23,900,000.00
Kotak Surat, Kotak Saran/Pengaduan		2,500,000.00	2,500,000.00
Alat Rumah Tangga		439,903,446.00	397,053,446.00
Meubelair		167,578,450.00	142,728,450.00
Alat Pendingin		43,299,996.00	43,299,996.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		92,425,000.00	92,425,000.00
Alat Pemadam Kebakaran		28,750,000.00	28,750,000.00
Televisi (TV)		4,850,000.00	4,850,000.00
Gorden		85,000,000.00	85,000,000.00
Karpets		18,000,000.00	-
Komputer		1,305,900,000.00	970,225,000.00
Personal Komputer		549,380,900.00	526,180,900.00
Peralatan Komputer Mainframe		123,300,000.00	-
Peralatan Mini Komputer		56,750,000.00	56,750,000.00
Peralatan Personal Komputer		208,250,000.00	208,250,000.00
Peralatan Jaringan		137,427,000.00	134,972,000.00
Printer		87,000,000.00	22,800,000.00
Scanner		33,300,000.00	-
UPS/Stabilizer		47,800,000.00	-
Kelengkapan Kompter		47,692,100.00	21,272,100.00

Komputer Notebook		15,000,000.00	-
Alat Studio		177,525,000.00	165,525,000.00
Peralatan Studio Visual		116,300,000.00	116,300,000.00
Peralatan Studio Video dan Film		15,725,000.00	15,725,000.00
Kamera		7,000,000.00	7,000,000.00
Mikrofon		38,500,000.00	26,500,000.00
Alat Komunikasi		73,375,000.00	69,875,000.00
Alat Komunikasi Telephone		46,975,000.00	43,475,000.00
Alat komunikasi Radio HF/FM		26,400,000.00	26,400,000.00
Peralatan Pemancar		1,900,000.00	1,900,000.00
Switcher Antena		1,900,000.00	1,900,000.00
Alat Kedokteran		953,700.00	953,700.00
Alat Kedokteran Umum		953,700.00	953,700.00
Unit-Unit Laboratorium		(953,700.00)	(953,700.00)
Alat Laboratorium Umum		(953,700.00)	(953,700.00)
Alat Keamanan dan Perlindungan		85,700,000.00	85,700,000.00
Alat Bantu Keamanan		85,700,000.00	85,700,000.00
Rekap Reklas Aset Peralatan dan Mesin		(196,193,000.00)	(196,193,000.00)
Rekap Reklas Aset Peralatan dan Mesin		(196,193,000.00)	(196,193,000.00)
Gedung dan Bangunan	C.18	297,849,000.00	297,849,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja		63,700,000.00	63,700,000.00
Bangunan Gedung Kantor		(886,250,240.00)	(886,250,240.00)
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		949,950,240.00	949,950,240.00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal		234,149,000.00	234,149,000.00
Rumah Negara Golongan II		234,149,000.00	234,149,000.00
Aset Tetap Lainnya		1,873,000.00	1,873,000.00
Buku		1,873,000.00	1,873,000.00
Umum		270,000.00	270,000.00
Ilmu Hukum, Peraturan, Perundang-undangan		1,603,000.00	1,603,000.00
Akumulasi Penyusutan		(3,289,838,405.67)	(2,915,000,349.67)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(3,159,133,545.67)	(2,790,252,469.67)
Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(3,159,133,545.67)	(2,790,252,469.67)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(130,704,860.00)	(124,747,880.00)
Rekap Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(130,704,860.00)	(124,747,880.00)
ASET LAINNYA		1,644,443,750.00	1,683,958,425.00
Aset Tidak Berwujud		45,399,750.00	84,914,425.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		205,135,700.00	157,362,700.00
Software		205,135,700.00	157,362,700.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(159,735,950.00)	72,448,275.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		(159,735,950.00)	72,448,275.00
Aset Lain-lain		1,599,044,000.00	1,599,044,000.00
Aset Lain-lain		1,599,044,000.00	1,599,044,000.00
Aset Lain-lain		6,000,000.00	6,000,000.00
Aset Rusak Berat		1,593,044,000.00	1,593,044,000.00
JUMLAH ASET		8,600,139,910.00	8,612,308,241.00
KEWAJIBAN		265,149,711.60	385,515,772.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		265,149,711.60	385,515,772.71
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	47,070,772.00	385,515,772.71
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	C.27	47,070,772.00	385,515,772.71
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	C.28	47,070,772.00	385,515,772.71
Utang Belanja	C.29	219,795,296.00	219,795,296.00
Utang Belanja Pegawai	C.30	217,992,985.00	219,777,723.00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS	C.31	217,992,985.00	207,684,723.00
Utang Honorarium Pegawai Non PNS		-	12,093,000.00
Utang Belanja Barang dan Jasa		85,954.00	17,573.00
Utang Belanja Jasa		85,954.00	17,573.00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		(47,773,000.00)	-
Utang Belanja Modal Aset Lainnya		47,773,000.00	-
JUMLAH KEWAJIBAN		265,149,711.60	385,515,772.71
EKUITAS		8,334,990,198.40	8,226,792,468.29
EKUITAS		8,334,990,198.40	8,226,792,468.29
Ekuitas		1,665,688,148.40	8,226,792,468.29
Ekuitas		8,226,792,468.29	8,226,792,468.29
Ekuitas		8,226,792,468.29	8,226,792,468.29
Surplus/Defisit - LO		(6,488,222,394.89)	-
Surplus/Defisit - LO		(6,488,222,394.89)	-

Ekuitas SAL		(72,881,925.00)	-
Estimasi Perubahan SAL		(65,774,425.00)	-
Estimasi Perubahan SAL		(7,107,500.00)	-
RKPPKD		6,669,302,050.00	-
RK PPKD		6,669,302,050.00	-
RK PPKD	C.32	6,669,302,050.00	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

DINAS KETENAGAKERJAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
PENDAPATAN - LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	D.1	133,116,000.00	273,923,800.00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO		133,116,000.00	273,923,800.00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO		133,116,000.00	273,923,800.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		133,116,000.00	273,923,800.00
JUMLAH PENDAPATAN		133,116,000.00	273,923,800.00
BEBAN			
BEBAN OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	D.2	4,676,260,604.00	3,204,946,584.00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	D.3	1,740,761,434.00	1,714,403,061.00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	D.4	1,344,966,860.00	1,333,639,820.00
Tunjangan Keluarga - LO	D.5	125,776,634.00	131,105,026.00
Tunjangan Jabatan - LO	D.6	163,930,000.00	130,965,000.00
Tunjangan Fungsional - LO	D.7	13,795,000.00	15,470,000.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	D.8	22,585,000.00	26,665,000.00
Tunjangan Beras - LO	D.9	68,074,800.00	73,723,560.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	D.10	1,615,169.00	2,815,721.00
Pembulatan Gaji - LO	D.11	17,971.00	18,934.00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO		2,935,499,170.00	1,485,293,523.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO			1,277,608,800.00
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Capaian Kinerja PNS - LO		2,935,499,170.00	207,684,723.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			5,250,000.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO			5,250,000.00
Beban Barang dan Jasa		2,300,207,937.00	6,713,478,917.00
Beban Bahan Pakai Habis		125,001,000.00	108,300,500.00
Beban Persediaan alat tulis kantor		117,229,500.00	100,872,000.00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu Pijar, battery kering)		1,872,500.00	2,450,000.00
Beban Persediaan peranko, materai dan benda pos lainnya		1,500,000.00	1,140,000.00
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		2,899,000.00	2,685,000.00
Beban Persediaan Alat/Perlengkapan Peserta		1,500,000.00	1,153,500.00
Beban Persediaan Bahan/Material		75,342,000.00	78,414,500.00
Beban Persediaan Makanan Pokok		38,562,000.00	40,214,500.00
Beban Persediaan Piagam/Sertifikat/Piala/Hadiah		2,280,000.00	1,700,000.00
Beban Persediaan Dekorasi		34,500,000.00	36,500,000.00
Beban Jasa Kantor		72,796,709.00	57,553,037.00
Beban Jasa Telepon		7,262,826.00	7,500,000.00
Beban Jasa Air		942,915.00	4,645,974.00
beban Jasa Listrik		675,468.00	538,963.00
Beban Jasa paket/pengiriman		6,423,500.00	4,943,000.00
Beban Jasa Publikasi		2,500,000.00	2,000,000.00
Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi		52,492,000.00	36,425,100.00
Beban Jasa Hiburan		2,500,000.00	1,500,000.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		37,212,629.00	26,569,602.00
Beban Jasa Service		10,924,445.00	6,147,323.00

Beban Penggantian Suku Cadang		19,983,184.00	14,138,279.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor		6,305,000.00	6,284,000.00
Beban Cetak dan Penggandaan		89,345,000.00	75,785,900.00
Beban Cetak		75,090,600.00	51,114,400.00
Beban Penggandaan		14,254,400.00	24,671,500.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		21,250,000.00	16,000,000.00
Beban Sewa Meja Kursi		21,250,000.00	16,000,000.00
Beban Makanan dan Minuman		95,511,200.00	73,358,100.00
Beban makanan dan minuman rapat		28,610,000.00	31,100,000.00
Beban makanan dan minuman tamu		11,367,200.00	4,908,100.00
Beban makanan dan minuman pelatihan		55,534,000.00	37,350,000.00
Belanja Perjalanan Dinas		377,200,558.00	317,100,987.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah		57,398,536.00	51,691,750.00
Beban perjalanan dinas luar daerah		319,802,022.00	265,409,237.00
Beban Pemeliharaan		38,430,000.00	32,385,000.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		5,690,000.00	1,650,000.00
Beban Pemeliharaan Komputer dan Jaringan		8,205,000.00	18,735,000.00
Beban Pemeliharaan Software/Aplikasi		24,535,000.00	12,000,000.00
Honorarium PNS		1,800,000.00	498,539,811.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1,800,000.00	3,900,000.00
Honorarium Pelaksana Kegiatan		-	494,639,811.00
Honorarium Non PNS		172,672,093.00	180,998,000.00
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		155,872,093.00	170,648,000.00
Honorarium Pelaksana Kegiatan		3,000,000.00	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		13,800,000.00	10,350,000.00
Beban Jasa Berlangganan		1,440,000.00	1,440,000.00
Beban Jasa Berlangganan		1,440,000.00	1,440,000.00
Beban Jasa Tenaga Terampil/Terlatih		19,275,000.00	33,762,500.00
Beban Jasa Tenaga Ahli		300,000.00	250,000.00
Beban Jasa Narasumber		9,000,000.00	29,012,500.00
Beban Jasa Tenaga Lepas		9,975,000.00	4,500,000.00
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)		540,100,000.00	800,000,000.00
Beban Kontribusi		540,100,000.00	800,000,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		396,351,306.00	(1,573,141,603.83)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		368,881,076.00	(136,100,886.33)
Rekap Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		368,881,076.00	(136,100,886.33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		5,956,980.00	(1,456,711,055.00)
Rekap Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		5,956,980.00	(1,456,711,055.00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		21,513,250.00	19,670,337.50
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		21,513,250.00	-
Beban Penyusutan / Amortisasi		-	19,670,337.50
JUMLAH BEBAN		6,739,988,099.00	3,932,012,917.17
SURPLUS (DEFISIT)-LO		(6,488,232,394.89)	(3,738,134,648.13)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KETENAGAKERJAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	8,226,792,468.29	8,226,792,468.20
RK PPKD	E.2	6,669,302,050.00	-
Surplus/Defisit - LO		(6,488,222,394.00)	-
Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya		(65,774,425.00)	-
Koreksi Ekuitas Lainnya		(7,107,500.00)	-
KOREKSI EKUITAS TAHUN SEBELUMNYA		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
JUMLAH EKUITAS AKHIR	E.5	8,334,990,198.40	8,226,792,468.29

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya di bidang ketenagakerjaan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Balikpapan.

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi:

- a. Penetapan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan;
- b. Penyelenggaraan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- c. Penyelenggaraan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan dan penempatan tenaga kerja;
- e. Penetapan kebijakan program dan pengembangan perluasan kerja;
- f. Penyelenggaraan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja;
- g. Penyelenggaraan dan pengendalian UPT;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Melalui peran tersebut diharapkan:

- (a) menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
- (b) meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- (c) mewujudkan perlindungan tenaga kerja, pengembangan kelembagaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- (d) meningkatkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan professional dengan prinsip good governance.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Ketenagakerjaan berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Ketenagakerjaan berdaya saing tinggi dalam iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh”***.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Peningkatan pelatihan kerja
- Peningkatan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terdiri dari yaitu:

1. Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi penetapan kebijakan dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
2. Sekretariat Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan anggaran dan penerimaan dinas, serta monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Sekretariat Dinas dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SAKIP, pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program maupun kegiatan dinas, penyusunan rencana kegiatan tahunan, serta pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah.
 - b. Sub Bagian Umum yang bertanggungjawab terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset, pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai, serta fasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertanggung jawab merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidangnya.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dibantu oleh :

- a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan yang bertanggung jawab terhadap penyusunan pelaksanaan pelatihan, pemagangan, serta pelaksanaan layanan rencana program dan kegiatan di seksinya, informasi program pelatihan dan pemagangan.
- b. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana program dan kegiatan di seksinya, pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan layanan perizinan LPK Swasta, memproses tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan.
- c. Seksi Produktivitas yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, penyebarluasan informasi produktivitas kerja kepada perusahaan kecil, pemantauan peningkatan produktivitas kerja, serta pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja.

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja yang bertanggungjawab merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidangnya.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dibantu oleh:

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja bagi pencari kerja maupun pemberi kerja.
 - b. Seksi Perluasan Kerja yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, penyebarluasan informasi kegiatan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, Padat Karya, dan Tenaga Kerja Mandiri.
 - c. Seksi Analisis Pasar Kerja dan Data Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, penyiapan bahan Rencana Ketenagakerjaan Daerah, dan pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bertanggungjawab merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidangnya.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dibantu oleh :

- a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, pembinaan pembentukan maupun bimbingan teknis lembaga kerja sama bipartit dan lembaga lainnya di perusahaan.
- b. Seksi Persyaratan Kerja yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis penyusunan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama.
- c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bertanggung jawab terhadap rencana program dan kegiatan di seksinya, pelaksanaan penyuluhan dalam rangka Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Dinas Ketenagakerjaan.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Ketenagakerjaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Ketenagakerjaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Ketenagakerjaan adalah Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diakui ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 3. belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Balikpapan. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Dinas Ketenagakerjaan telah mengadakan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari DPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan	Rp 202,800,000.00	Rp 202,800,000.00
Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 202,800,000.00	Rp 202,800,000.00
Lain-lain PAD yang Sah	Rp -	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp 202,800,000.00	Rp 202,800,000.00
Belanja	Rp 6,730,522,800.00	Rp 7,273,158,800.00
Belanja Pegawai	Rp 4,393,232,000.00	Rp 4,946,723,000.00
Belanja Barang	Rp 2,048,940,800.00	Rp 1,897,505,800.00
Belanja Modal	Rp 288,350,000.00	Rp 428,930,000.00
Jumlah Belanja	Rp 6,730,522,800.00	Rp 7,273,158,800.00

Sedangkan apabila dilihat dari program Dinas Ketenagakerjaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4

PROGRAM	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pelayanan Administrasi Perkantoran	620,586,300	757,461,300
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398,950,000	539,530,000
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	696,905,000	473,365,000
Peningkatan Kesempatan Kerja	131,612,000	95,772,000
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	180,537,500	151,607,500
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	260,700,000	260,700,000
Program Pengembangan Data/Informasi	48,000,000	48,000,000
Total Belanja	2,337,290,800	2,326,435,800

B.1 Pendapatan Asli Daerah Rp. 133.116.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 133.116.000,00 atau mencapai 65.64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 202.800.000, dikarenakan adanya Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan berdasarkan :

1. Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.55/1217/Org, Tanggal 29 Juni 2019, Tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
2. Berita Acara Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dari Dinas Ketenagakerjaan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 067/175/Org/2018, Tanggal 02 Juli 2018;
3. Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Dinas Ketenagakerjaan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 900/1411/Disnaker, Tanggal 28 September 2018.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	202,800,000.00	133,116,000.00	65.64
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
Jumlah	202,800,000.00	133,116,000.00	65.64

Realisasi Pendapatan TA 2018 tidak melebihi target disebabkan adanya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah	133,116,000	273,923,800	-51.40
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0.00
Jumlah	133,116,000	273,923,800	-51.40

Realisasi pendapatan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan sebesar 51.40%. Hal ini disebabkan pembayaran Retribusi IMTA berpindah ke Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

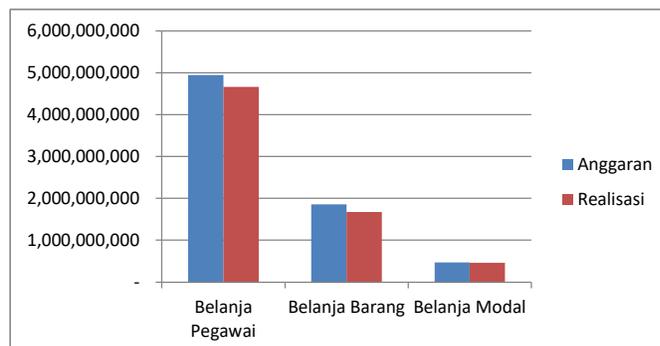
B.2. BELANJA Rp. 6.802.418.050,00

Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 6.802.418.050,00 atau 93.53 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 7.273.158.800,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 tersaji sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4,946,723,000.00	4,665,952,342.00	94.32
Belanja Barang	1,854,430,800.00	1,673,560,208.00	90.25
Belanja Modal	472,005,000.00	462,905,500.00	98.07
Total Belanja	7,273,158,800.00	6,802,418,050.00	93.53

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2018

PPROGRAM	2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	757,461,300	711,687,343	93.96
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	539,530,000	478,085,129	88.61
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	473,365,000	451,554,896	95.39
Peningkatan Kesempatan Kerja	95,772,000	79,377,000	82.88
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	151,607,500	136,228,340	89.86
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	260,700,000	231,760,000	88.90
Pengembangan Data/Informasi	48,000,000	47,773,000	99.53
Total Belanja	2,326,435,800	2,136,465,708	91.83

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami Kenaikan sebesar 28,62 % dibandingkan pada TA 2017. Hal ini disebabkan Efektifitas Pelaksanaan Program Kegiatan sesuai dengan Perencanaan.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,665,952,342.00	2,997,261,861.00	(55.67)
Belanja Barang	1,673,560,208.00	2,291,411,036.00	26.96
Belanja Modal	462,905,500.00	-	-
Jumlah	6,802,418,050.00	5,288,672,897.00	(28.62)

B.3. Belanja Pegawai	Rp. 4.665.952.342,00
Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Rp. 4.665.952.342,00	Rp. 2.997.261.861,00

Terjadi Kenaikan sebesar 28,62 % % dari TA yang lalu.

Tabel 10**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017**

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Gaji Pokok/Uang Representasi	1,344,966,860.00	1,333,639,820.00	0.85
Tunjangan Keluarga	125,776,634.00	131,105,026.00	-4.06
Tunjangan Jabatan	163,930,000.00	130,965,000.00	25.17
Tunjangan Fungsional	13,795,000.00	15,470,000.00	-10.83
Tunjangan Fungsional Umum	22,585,000.00	26,665,000.00	-15.30
Tunjangan Beras	68,074,800.00	73,723,560.00	-7.66
Tunjangan pph/Tunjuangan Khusus	1,615,169.00	2,815,721.00	-42.64
Pembulatan Gaji	17,971.00	18,934.00	-5.09
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	0.00	1,277,608,800.00	-100.00
Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Capaian Kinerja PNS	2,925,190,908.00	207,684,723.00	1308.48
Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LRA	133,116,000	273,923,800	-51.40
Jumlah Belanja	4,799,068,342.00	3,473,620,384.00	38.16

B.4 Belanja Barang**Rp. 1.673.560.208,-****Per 31 Desember 2018****Per 31 Desember 2017****Rp. 1.673.560.208,-****Rp. 2.291.411.036,-**

Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 26,96 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pengurangan Belanja
2. Perubahan rincian belanja untuk keperluan rekrutmen HSE dan PPSDM serta penambahan alat kerja (tinta printer A3, dll);
3. Perubahan rincian belanja untuk keperluan kegiatan program dan keuangan (cetak kertas A1, A2 Glosi) dan penyesuaian harga fotocopy;
4. Perubahan pagu dana penyediaan makanan dan minuman menyesuaikan kebutuhan makan minum harian dengan jumlah hari kerja dan peningkatan intensitas kunjungan kerja dari luar daerah;
5. Perubahan pagu dana perjalanan dinas karena adanya penambahan intensitas rapat/koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan proyek strategis nasional berupa pelatihan kerja calon tenaga kerja proyek up grading kilang minyak PERTAMINA RU V Balikpapan;
6. Perubahan rincian belanja karena adanya kenaikan UMK di Tahun 2018 yang berpengaruh kepada nilai iuran JKK dan JKM serta adanya kekurangan pembayaran honorarium non PNS untuk ulan Desember 2017 sebesar Rp. 12.093.000,00;
7. Kenaikan Pagu Dana menyesuaikan penambahan perlengkapan layak fungsi guna optimalisasi kinerja OPD;
8. Kenaikan pagu dana menyesuaikan penambahan peralatan fungsi guna optimalisasi kinerja OPD;

9. Untuk menghindari duplikasi anggaran saku di BLK Pusat serta untuk mendukung kegiatan rekrutmen CSR Perusahaan (Pertamina) dan PPSDM Migas Cepu;
10. Untuk menghindari duplikasi anggaran karena ada kegiatan yang sama di tingkat Provinsi Kaltim dengan sasaran LPK yang sama di Kota Balikpapan;
11. Efisiensi dan efektivitas belanja pemeliharaan software/aplikasi Ketenagakerjaan SIMTK dan SITA mengingat adanya aplikasi baru yang akan digunakan dan belanja pendukung lainnya untuk pelayanan antar kerja;
12. Karena adanya kekeliruan di dalam perhitungan honor instruktur dan apabila dilaksanakan pada APBD Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukup;
13. Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran mengingat kegiatan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembinaan syarat kerja (Wednesday Inspiring).

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja bahan pakai habis	123,834,000	110,304,000	12.27
Belanja bahan/material	75,342,000	78,414,500	(3.92)
Belanja jasa kantor	72,728,328	57,710,036	26.02
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37,212,629	26,569,602	40.06
Belanja Cetak dan penggandaan	84,671,400	76,921,500	10.08
Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	21,250,000	16,000,000	32.81
Belanja makanan dan minuman	95,511,200	73,358,100	30.20
Belanja Perjalanan Dinas	377,200,558	317,100,987	18.95
Belanja Pemeliharaan	38,430,000	32,385,000	18.67
Belanja jasa berlangganan	1,440,000	1,440,000	-
Belanja Jasa Tenaga Terampil/terlatih	19,275,000	33,762,500	(42.91)
Belanja Kursus pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	540,100,000	800,000,000	(32.49)
Belanja Honorarium Non PNS	184,765,093	168,905,000	9.39
Belanja Honorarium PNS	1,800,000	498,539,811	(99.64)
Jumlah Belanja	1,673,560,208	2,291,411,036	(26.96)

B.5 Belanja Modal

Rp. 462.905.500,-

Per 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2017

Rp. 462.905.500,-

Rp. 0,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 100 %.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415,132,500.00	-	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0
Belanja Modal Aset Lainnya	47,773,000.00	-	0
Jumlah Belanja	462,905,500.00	-	0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat belanja modal tanah untuk TA 2018 dan 2017.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 415.132.500,-

Per 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2017

Rp. 415.132.500,-,-

Rp. 0,00

Terdapat belanja modal peralatan dan mesin untuk TA 2018 sebesar Rp. 415.132.500,-

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Alat Kantor	14,000,000.00	0.00	0.00
Alat Rumah Tangga	43,570,000.00	0.00	0.00
Komputer	342,062,500.00	0.00	0.00
Alat Studio	12,000,000.00	0.00	0.00
Alat Komunikasi	3,500,000.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	415,132,500.00	0.00	0.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan untuk TA 2018 dan 2017.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk TA 2018 dan 2017.

B.5.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2017

Rp. 47.773.000,00

Rp. 0,00

Terdapat belanja modal aset tetap lainnya untuk TA 2018 Rp. 47.773.000,00 dan untuk tahun 2017 Tidak terdapat belanja modal aset tetap lainnya.

Tabel 14*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**TA 2018 dan TA 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2018	T.A 2017	Naik (Turun) %
Aset Lain-lain	47,773,000	0	0.00
Jumlah Belanja	47,773,000	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0,00

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

C.5 Piutang Retribusi Daerah Rp. 0,00

Tidak terdapat Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

C.12 Persediaan	Rp. 1.280.500,00
Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Rp. 1.280.500,00	Rp. 7.121.100,00

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0,00

Tidak terdapat tagihan penjualan angsuran per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp. 0,00

Tidak terdapat penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka panjang per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

C.16 Tanah**Rp. 6.170.250.000****Per 31 Desember 2018****Per 31 Desember 2017****Rp. 6.170.250.000,00****Rp. 6.170.250.000,00**

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Tabel 15

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	6,170,250,000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	6,170,250,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	6,170,250,000

Rincian Aset Tetap Tanah dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Peralatan dan Mesin**Rp. 3.774.282.065,67****Per 31 Desember 2018****Per 31 Desember 2017****Rp. 3.774.282.065,67****Rp. 3.366.257.065,67**

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 16

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	4,075,044,349
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	4,075,044,349.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	3,159,133,545.67
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	915,910,803.33

C.18 Gedung dan Bangunan	Rp. 0,00
Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Rp. 0,00	Rp. 297.849.000,00

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Saldo per 31 Desember 2017	3,427,949,240.00
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	0.00
Koreksi pencatatan	0.00
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	0.00
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2018	3,427,949,240
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	130,704,860
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3,297,244,380

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00

Tidak terdapat kegiatan dan realisasi pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.20 Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.873.000,00
Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Rp. 1.873.000	Rp. 1.873.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat kegiatan dan realisasi pekerjaan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) untuk TA 2018 dan 2017.

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp. 3.289.838.405,67
Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Rp. 3.289.838.405,67	Rp. 2.915.000.349,67

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Tabel 18

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6,170,250,000.00	-	6,170,250,000.00
2	Peralatan dan Mesin	3,774,282,065.67	3,159,133,545.67	615,148,520.00
3	Gedung dan Bangunan	297,849,000.00	130,704,860.00	167,144,140.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1,873,000.00	-	1,873,000.00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		10,244,254,065.67	3,289,838,405.67	6,954,415,660.00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2018

Rp. 45.399.750,00

Per 31 Desember 2017

Rp. 84.914.425,00

Tabel 19

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2018

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 205,135,700
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		Rp 205,135,700

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.24 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2018

Rp. 1.599.044.000

Per 31 Desember 2017

Rp. 1.599.044.000

Nilai aset Rp.6.000.000 yang terdapat dineraca keuangan (SIPKD) berdasarkan “AUDITED Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018” masih dalam penulusuran lebih lanjut karena nilai tersebut tidak ada dalam Aplikasi (SIMDA BMD).

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**Per 31 Desember 2018****Per 31 Desember 2017****Rp. 72.881.925****Rp. 0.00**

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 20**Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya**

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud	Rp 205,135,700	Rp 159,735,950	Rp 84,914,425
1	Software Komputer	-	-	-
2	Paten	-	-	-
	Jumlah	205,135,700	159,735,950	84,914,425
	Total	205,135,700	159,735,950	84,914,425

C.26 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Tidak terdapat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.27 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tidak terdapat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2018 Rp. 0.00**TA 2017 Rp. 0.00**

Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.29 Pendapatan Diterima di Muka Rp. 47.070.772,60

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75.691.173,70 dan 2017 sebesar Rp. 165.720.476,71. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan daerah yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Ketenagakerjaan berupa pembayaran retribusi perpanjangan IMTA. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan pada lampiran.

Tabel 21*Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2018*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	6	Perusahaan yang mempekerjakan TKA
Instansi Pemerintah Lainnya	-	
Badan Lainnya	-	
Total	6	

C.30 Beban yang Masih Harus Dibayar Rp. 218.078.939,00**Per 31 Desember 2018****Per 31 Desember 2017****Rp. 218.078.939,00****Rp. 219.795.296,00**

Merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2018 dan TA 2017*

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	217,992,985	219,777,723
Belanja Barang/jasa yang Masih Harus Dibayar	85,954	17,573
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	218,078,939	219,795,296

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan eselon I disajikan pada lampiran.

C.31 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Tidak terdapat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2018 dan 2017.

C.32 Ekuitas Rp. 8.334.990.198,40**Per 31 Desember 2018****Per 31 Desember 2017****Rp. 8.334.990.198,40****Rp. 8.226.792.468,29**

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Asli Daerah

Per 31 Desember 2018

Rp. 133.116.000,00

Per 31 Desember 2017

Rp. 273.923.800,00

Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23

Perbandingan Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	%NAIK (TURUN)
Pendapatan Asli Daerah			
Pendapatan Pajak Daerah			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	133,116,000	273,923,800	-51.40%
-	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	133,116,000	273,923,800	-51.40%
Jumlah	133,116,000	273,923,800	-51.40%

D.2 Beban Pegawai

Tidak terdapat Beban Pegawai untuk Tahun 2018 dan 2017.

D.3 Beban Barang dan Jasa

Tidak terdapat Beban Barang untuk Tahun 2018 dan 2017.

D.5 Beban Bunga

Tidak terdapat Beban Bunga Tahun 2018 dan 2017.

D.6 Beban Subsidi

Tidak terdapat Beban Subsidi Tahun 2018 dan 2017.

D.7 Beban Hibah

Tidak terdapat Beban Hibah untuk Tahun 2018 dan 2017

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.289.838.405,67 dan Rp 2.915.000.349,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,159,133,545.67	2,790,252,469.67	13%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	130,704,860.00	124,747,880.00	5%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0%
Jumlah Penyusutan	3,289,838,405.67	2,915,000,349.67	13%
			0%
Beban Amortisasi Aplikasi		-	0%
Beban Amortisasi ATB Lainnya		-	0%
Jumlah Amortisasi			0%
Beban Penyusutan Aset Lain-lain		-	0%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,289,838,405.67	2,915,000,349.67	13%

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan Tahun 2017.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.334.990.198,40 dan Rp 8.226.792.468,29.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. (6.488.222.394,89) dan 2017 sebesar Rp. 0.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. (72.881.925,00)

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2018

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 26

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin			
Gedung dan Bangunan			
Aset Tetap Lainnya			
Aset Tak Berwujud			
Jumlah			-

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Daerah, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Tabel 27

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik antar SKPD, maupun SKPD dengan PKPKD. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.00 dan 2017 sebesar Rp. 0.00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Adanya Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan terkait pendapatan daerah Tahun anggaran 2018 berdasarkan :
 1. Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.55/1217/Org, Tanggal 29 Juni 2019, Tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
 2. Berita Acara Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dari Dinas Ketenagakerjaan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 067/175/Org/2018, Tanggal 02 Juli 2018;
 3. Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Dinas Ketenagakerjaan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor : 900/1411/Disnaker, Tanggal 28 September 2018.

- Adanya program penghematan belanja dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak adanya hal-hal lain yang mempengaruhi organisasi seperti perubahan SOPD dan Pergantian Pejabat di tahun berjalan.

DINAS KETENAGAKERJAAN

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/amortisasi, Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Nilai Buku	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Per 31-12-2017	Per 31-12-2018	Per 31-12-2018
1	Tanah	-	6,170,250,000.00	-	6,170,250,000	-	6,170,250,000
2	Peralatan dan Mesin	7	3,774,282,065.67	2,790,252,469.67	984,029,596	3,159,133,546	615,148,520
3	Gedung dan Bangunan	50	297,849,000.00	124,747,880.00	173,101,120	130,704,860	167,144,140
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40	1,873,000.00	-	1,873,000	-	1,873,000
5	Aset Tetap Lainnya	4	-	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Total			10,244,254,066	2,915,000,349.67	7,329,253,716	3,289,838,406	6,954,415,660